



APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE TO THE EFFECTIVENESS OF EMPLOYEE PERFORMANCE AT THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FOOD SECURITY, AND FISHERIES, PONOROGO REGENCY

Munika Marga Utama Yulistiana¹, Supri Wahyudi Utomo², dan Liana Vivin Wihartanti^{3*}

¹Pendidikan Akuntansi, Universitas PGRI Madiun, Indonesia

²Pendidikan Akuntansi, Universitas PGRI Madiun, Indonesia

³Pendidikan Akuntansi, Universitas PGRI Madiun, Indonesia

*Email : lianavivin@unipma.ac.id

Abstrak

Pola pemerintahan yang baik maupun Good Governance jadi tuntutan sekaligus kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan Tujuan penelitian ini adalah: 1) menganalisis pengaruh Partisipasi terhadap efektivitas kinerja pegawai, 2) menganalisis pengaruh transparansi terhadap efektivitas kinerja pegawai, 3) pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas kinerja pegawai, dan 4) pengaruh daya tangkap terhadap efektivitas kinerja pegawai. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode survey dengan menggunakan teknik kuesioner. Metode penentuan sampel menggunakan teknik sampling jenuh. Sampel yang digunakan berjumlah 5 Orang. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara 1) parsial partisipasi berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pegawai nilai t_{hitung} sebesar 4,072 beserta signifikansi 0,000 Nilai t_{tabel} sebesar 2,037 yang berarti $t_{hitung} 4,072 > t_{tabel} 2,037$ dan signifikansi $0,000 < 0,05$, 2) transparansi berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pegawai, 3,948 beserta signifikansi 0,000 Nilai t_{tabel} sebesar 2,037 yang berarti $t_{hitung} 3,948 > t_{tabel} 2,037$ dan signifikansi $0,000 < 0,05$ 3) akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pegawai, dan daya tangkap berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pegawai t_{hitung} sebesar 2,099 beserta signifikansi 0,043 Nilai t_{tabel} sebesar 2,037 yang berarti $t_{hitung} 2,099 > t_{tabel} 2,037$ dan signifikansi $0,043 > 0,05$.

Kata Kunci: Partisipasi, transparansi, akuntabilitas, daya tangkap dan efektivitas kinerja.

Abstract

Good governance patterns and good governance are demands and needs in governance. The aims of this study are: 1) to analyze the effect of participation on the effectiveness of employee performance, 2) to analyze the effect of transparency on the effectiveness of employee performance, 3) the effect of accountability on the effectiveness of employee performance, and 4) the influence of grasping power on the effectiveness of employee performance. The research method used is causal quantitative and the type of data used is primary data. A sample of 50 respondents was taken from the finance department, personnel and general department, the program composition section, the plant section and horticulture with purposive sampling method. partial test is used. Based on the test results, it shows that partially participation affects the effectiveness of employee performance, transparency affects the effectiveness of employee performance, accountability affects the effectiveness of employee performance, and capture power affects the effectiveness of employee performance.

Keywords: Participation, transparency, accountability, capture and performance effectiveness.

PENDAHULUAN

Terlaksanakannya prinsip *Good Governance* di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo ada prinsip yang masih terdapat kasus yaitu terdapat permasalahan pelayanan publik ataupun public services di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, serta Perikanan yang hingga dikala ini jadi perkara yang butuh atensi serta penyelesaian yang komperhensif dengan dibuktikan ketidakpuasan masyarakat. Minimnya transparan dalam pengambilan sesuatu keputusan yang dicoba pemerintah, pengaruh pelayanan yang kurang baik sehingga menyebabkan minimnya kepuasan masyarakat, sebaliknya perihal keterbukaan data di dinas telah lumayan baik dengan membagikan suatu data yang diarahkan kepada masyarakat lewat web paling utama buat laporan kinerja yang harus disertakan dalam data antara lain Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Umum (IKU) serta perjanjian kinerja yang lain- lain, namun keterbukaan informasi mengenai hal pertanian, ketahanan pangan masih kurang adanya penyuluh yang mengakibatkan pedasaan wilayah pelosok tidak tau-menahu terkait bantuan atau subsidi yang mengenai pertanian. Kasus yang lain pula ada akuntabilitas yang minimnya pemahaman dalam kewajiban yang wajib dipertanggungjawabkan yang dinilai jadi faktor pemicu tingkatan kinerja yang kurang baik dan ketidak sesuaian dalam standar pelaksanaan dengan posedur pelaksanaan. Daya tangkap dalam pegawai pula bermasalah, petugas acuh tidak acuh dalam melayanai warga serta keterlambatannya dalam menjawab sesuatu kritikan ataupun komentar masyarakat.

Pengembangan dengan peneliti sebelumnya yang dilakukan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Ponorogo terkait *Good Governance* pernah diteliti oleh Wahyuningtias (2020) yang berjudul pengaruh partisipasi anggaran, akuntansi pertanggung jawaban dan teknologi informasi terhadap kinerja pegawai, sehingga peneliti memperluas pengembangan yang ditemukan Wahyuningtias (2020) dengan menambah variabel dari *Good Governance* yang akan diteliti yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan daya tangkap dengan variabel dependennya efektivitas kinerja pegawai hasil yang diinginkan oleh peneliti sesuai dengan apa yang direncanakan. Penjelasan diatas menjadi hal menarik peneliti dalam melakukan pengkajian secara mendalam yang terkait dengan "**Penerapan *Good Governance* Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo**".

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Penerapan *Good Governance*

Paradigma dalam sistem pemerintahan menjadikan publik terhadap implemementasi *Good Governance* semakin menguat bersamaan dinamika kehidupan bernegara dimana Pengevaluasian pemerintah dalam mengatarkan pelayanan dikatakan kurang baik sehingga menyelenggarakan sebuah perencanaan kurang baik (Warjiyati, 2018). *Good Governance* oleh Irianto (2016) percakapan yang berkaitan dengan administrasi Negara menjadikan acuan pemerintah dalam pelayanan publik. Tata pemerintahan yang baik didasari pada pengambilan keputusan dengan segenap proses yang telah dilewati dari percobaan sampai dengan penerapan.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* dianggap sebagai landasan bagi pemerintahan dalam mengembangkan standar prosedur pelaksanaan yang dapat menyejahterakan negara, sektor swasta, maupun masyarakat.

Partisipasi

Prinsip Partisipasi yang dikembangkan oleh OESD yaitu menjadikan dasar pembangunan yang sesuatu kebutuhan sehari-hari semacam halnya kebutuhan. Perihal ini diberikan peluang buat berpartisipasi dalam melakukan pembangunan, perlunya pembangunan sebab sesuatu pergantian proses kedalam hal yang positif guna meningkatkan mutu program serta selaku motivasi pegawai dalam melakukan program yang pada kesimpulannya menjadikan kinerja bertambah secara efisien serta efektif.

Transparasi

Pengembangan prinsip yang di OESD ini transparasi yang menjamin kebebasan masyarakat dalam mendapatkan informasi atas pertanggungjawaban pemerintah dengan adanya keterbukaan akan membantu masyarakat dalam mengetahui informasi dan juga perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah jika memiliki keterbukaan informasi akan meningkatkan efektivitas kinerja pegawai.

Akuntabilitas

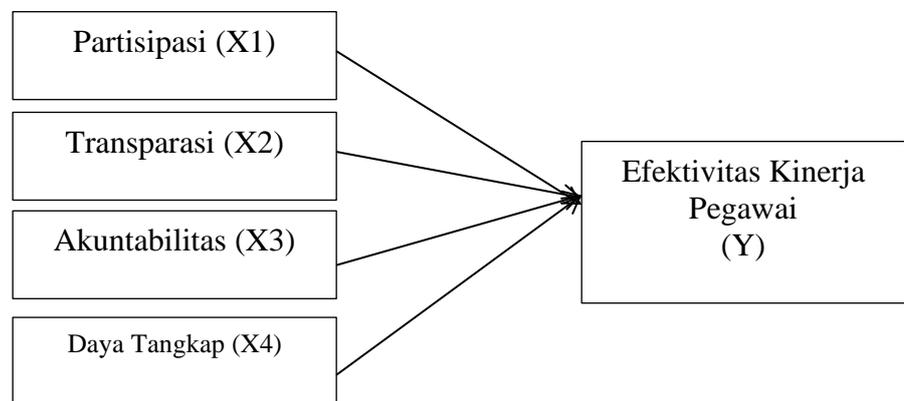
Pengembangan dari OESD adalah peningkatan akuntabel dari pemerintah tersebut bagus akan berpengaruh pada efektivitas kinerja pegawai yang baik. Mempertanggungjawabkan akuntabilitas pemerintah sangat sulit dalam hal meningkatkan dan mempertahankan hasil yang telah diterapkan. Pencapaian yang diinginkan oleh pemerintah dinilai dari tingkat efisiensi, kejujuran, dan kebijakan yang baik agar penyimpangan wewenang dalam akuntabilitas tidak terjadi.

Daya tangkap

Pengembangan dari OESD terkait dengan prinsip *Good Governance* yang nomor 4 tentang daya tangkap yang menggambarkan pelayanan yang baik sesuai dengan visi misi dalam mencapai tujuan untuk membantu masyarakat dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat dengan cepat, tepat dan akurat sehingga masyarakat menilai bahwa kinerja pegawai cukup efektif.

Efektivitas Kinerja Pegawai

Kinerja menggambarkan hasil pencapaian dari kegiatan organisasi berlandaskan pada sasaran ditetapkan organisasi yang setelah itu memastikan perkembangan organisasi dan menjadikan bahan penilaian organisasi tersebut pada waktu berikutnya (Silaningsih *et al.*, 2022). Kinerja juga di jelaskan menurut Moehersono (2010) berpendapat suatu kinerja mempengaruhi keberhasilan yang keterkaitan terhadap kepuasan karyawan dengan imbalan diberikan dan kreativitas karyawan berupa keterampilan, Kemampuan, serta sifat Individu. Ada sebagian faktor yang mengsuggesti efektivitas kinerja antara lain : (1) keinginan terkait imbalan, (2) Dorongan, (3) Keahlian, (4) Kebutuhan serta sikap, (5) asumsi serta tugas, (6) keinginan pada aspek luar dan juga dalam, (7) anggapan terhadap tingkatan imbalan serta kepuasan kerja. Manajemen atau atasan dapat menilai kinerja organisasi secara cepat dan kompetitif.



Gambar 1. Desain Penelitian

PERUMUSAN HIPOTESIS

Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah penjelasan dari permasalahan dan rumusan masalah yang mengansumsi dugaan sementara jawaban yang disebutkan oleh peneliti terkait dengan masalah yang disebutkan di latar belakang. Dugaan sementara dari peneliti adalah:

Pengaruh Prinsip Partisipasi Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai

Partisipasi dapat dilihat dan dilaksanakan sebagai bentuk sosialisasi Kebijakan Pemerintah kepada masyarakat. Kebijakan perlu diadakannya sosialisasi pemerintahan untuk memberikan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan kedepannya agar tidak terjadi perpaduan yang tidak mengenakan. Menurut Purba dan Djamin (2015) partisipasi masyarakat berfungsi sebagai berkontribusi dalam musyawarah, rancangan, penerapan dan melihat proses kerja pemerintah dalam kebijakan mengelola, membangun kepercayaan masyarakat, dan mengembangkan masyarakat.

Pengertian partisipasi masyarakat dikomentari oleh Bisman *et al.*, (2019) dikatakan bahwa keterlibatan sebagai masyarakat dalam pembangunan, meliputi perencanaan kegiatan dan program perencanaan pembangunan. Pembangunan dianggap hal yang berguna oleh partisipasi masyarakat, karena menjadikan salah satu pusat pembangunan yang dilakukan masyarakat secara langsung atas kebijakan dari kegiatan pembangunan. Masyarakat ikut serta dalam kelibatan kebijakan formulasi ataupun sebagai kebijakan aplikasi tersebut, Masyarakat juga anggap lebih mengerti tentang kondisi lingkungannya.

Hasil partisipasi dikemukakan oleh Farid dan Sudarmanto (2019) yang menyatakan partisipasi anggota berpengaruh terhadap efektivitas dimana pada dasarnya partisipasi yang semakin berkontribusi aktif maka meningkat pula pada efektivitas yang baik sehingga akan mencapai keberhasilan yang sesuai harapan pada perusahaan. Partisipasi juga dikemukakan oleh Endah (2016) yang hasilnya menyebutkan partisipasi berpengaruh efektivitas dikarenakan pada pembangunan dikabupaten pangandaran diperlukan keikutsertaan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas partisipasi berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pegawai. Hipotesis yang menyatakan prinsip tersebut adalah:

H1 : Prinsip Partisipasi berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pegawai pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo

Pengaruh Prinsip Transparansi Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai

Mengemukakan Nahrudin (2014) Transparansi ialah kebebasan untuk mengakses kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan dan keputusan yang dibuat oleh pemimpin, transparansi juga memiliki keputusan yang melibatkan pemangku kepentingan untuk memahami pelaksanaan serta tugas pemerintah yang merupakan sasaran dari penerapan dan akuntabilitas (pelaporan) suatu bentuk periode masa lalu. Menurut Nahrudin (2014) Transparansi juga berarti pencatatan pembukuan yang memiliki keterbukaan kepada masyarakat dan dapat dicari dengan mudah kegiatan yang berada di pemerintah ini merupakan kunci untuk mendapatkan kepercayaan publik. Transparansi mengacu pada prinsip bahwa pemerintah mengungkapkan informasi tentang beberapa aspek pelayanan publik, dan hasilnya akan memuaskan masyarakat. Hasil penelitian dilakukan oleh Meme (2019) menunjukkan transparansi berpengaruh positif terhadap efektivitas kinerja pegawai pemerintah daerah.

Hasil transparansi yang diteliti Jitmau *et al.*, (2017) menerangkan transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dengan ditunjukkan dalam memberikan informasi melalui sarana yang cepat, akurat, jelas dan bisa dilihat oleh pihak yang berkepentingan. Hasil lain juga dilakukan oleh yang hasilnya adalah transparansi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah yang dibutuhkan suatu instansi dalam memberikan informasi-informasi yang akan membuat kepercayaan pihak luas percaya kepada pemerintah dalam meningkatkan kinerja yang baik. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian dikemukakan oleh Lestiawan dan Jatmiko (2015) keterbukaan informasi sangat penting bagi pemerintah dengan mendorong kinerja dalam

penerapan program-program yang nantinya akan menjadi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Dari uraian di atas maka di simpulkan dalam hipotesis yaitu sebagai berikut:
H2 : Prinsip Transparasi berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pegawai pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai

Pengembangan yang diterapkan oleh OESD menyatakan akuntabilitas berarti tanggungjawab dalam pelaksanaan pemerintah yang memacu pada hasil dan gagalnya rencana kegiatan yang telah sesuai dengan visi misi diterapkan oleh pemerintah sehingga penilaian bisa dilihat pada target dan sasaran yang tepat.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Kholidah & Mildawati (2017) penjelasan penelitian tersebut terdapat variabel yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap efektivitas kinerja adalah akuntabilitas. Akuntabilitas disini dikatakan positif bahwa pengaturan pada akuntabilitas dapat bertanggungjawab dalam pengawasan terhadap audit yang akan meningkatkan kinerja pegawai. Penelitian lain juga ditemukan Edowati *et al.*, (2021) akuntabilitas dalam pelaksanaan pertanggungjawaban terkait dengan anggaran dan memiliki keterbukaan pada saat diperiksa sehingga menjamin efektivitas kinerja terjamin.

Hasil dari Wahyuni Arifin dan Saiful Muchlis (2021) yang hasilnya akuntabilitas memiliki penyelenggaraan yang berupa keterbukaan agar memudahkan pengawasan publik dan terhindar penyalahgunaan wewenang sehingga efektivitas meningkat sejalan dengan kinerja pegawai yang bagus. penelitian dari Lestiawan dan Jatmiko (2015) sejalan dengan hasil penelitian ini yaitu suatu prinsip akuntabel yang artinya hasil program yang diterapkan akan bertanggungjawab terhadap kebijakan yang telah dibuat. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan dalam rumus hipotesis sebagai berikut:

H3 : Prinsip Akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pegawai pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo

Pengaruh Responsiveness (Daya Tangkap) Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai

Menurut Tjiptono & Chandra (2011) *Responsiveness* (Daya Tangkap) ialah berkenaan dengan ketersediaan serta keahlian karyawan dalam menolong para pelanggan dalam merespon pemerintahan serta menginformasikan jasa yang dikirimkan sanggup ditanggapi dengan segera, perihal tersebut pasti jadi kepuasan tertentu pada publik. Dalam menghasilkan kepuasan dalam publik diperlukan kinerja yang besar serta ada kenaikan kerja yang bagus sanggup menghasilkan kemampuan yang terdapat pada pegawai buat menghasilkan kepuasan publik.

Hasil dari riset Indra (2019) menampilkan jika daya tangkap mempengaruhi terhadap daya guna kinerja pegawai yang hendak menolong masyarakat dalam menuntaskan kasus yang dialami dan mengukur bersumber pada penunjuk pelayanan yang kilat, penyampaian data yang jelas, bersedia buat menolong publik, dan pelayanan yang pas waktu. Apabila pegawai melaksanakan pelayanan yang responsive, sehingga publik bakal merasakan puas terhadap pelayanan.

Penelitian Lestiawan dan Jatmiko (2015) hasil yang diperoleh adalah kualitas pelayanan yang menjadi penilaian masyarakat dalam kinerja, semakin baik pelayanan masyarakat maka masyarakat akan menilai kinerja akan bertambah baik pula. Pegawai sudah seharusnya menampung aspirasi atau keluhan dari masyarakat yang kemudian ditidaklanjuti untuk memberikan solusi bukan hal merugikan masyarakat. Dari uraian diatas dapat disimpulkan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Prinsip *Responsiveness* (Daya Tangkap) berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pegawai pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Ponorogo

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian asosiatif yang artinya memiliki keterkaitan antara dua variabel atau lebih yang memiliki jalinan disalah satu variabel (independen) mempengaruhi variabel lain (dependen).

Berdasarkan judul penelitian yaitu Penerapan Prinsip *Good Governance* Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai Pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Ponorogo. Fokus penelitian yang dijadikan sampel dalam melakukan pengujian kuesioner yaitu:

Tabel. 1 Populasi dan Sampel

Nama Bidang	Jumlah
Bidang Keuangan	9 orang
Bidang Kepegawaian dan umum	9 orang
Bidang Prasarana dan sarana pertanian	9 orang
Bidang tanaman dan hortikultura	23 orang
Total	50 orang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kesimpulan hasil pengujian hipotesis diatas, pembahasan di dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pengaruh Partisipasi Terhadap Efektifitas Kinerja Pegawai

Dari penelitian mendukung hipotesis yang menyatakan “Partisipasi berpengaruh terhadap efektifitas kinerja pegawai”. Dapat dilihat nilai t_{hitung} sebesar 4,072 beserta signifikansi 0,000 Nilai t_{tabel} sebesar 2,037 yang berarti $t_{hitung} 4,072 > t_{tabel} 2,037$ dan signifikansi $0,000 < 0,05$, Maka dapat diputuskan bahwa H_1 diterima yang berarti X_1 (partisipasi) berpengaruh terhadap Y (Efektivitas kinerja pegawai), hal ini menunjukkan bahwa selain partisipasi masyarakat terdapat factor yang mempengaruhi efektivitas kinerja pegawai.

Partisipasi menjadikan keterlibatan warga dalam pembangunan, meliputi perencanaan aktivitas serta program perencanaan pembangunan. Pembangunan ini dikira perihal yang bermanfaat oleh partisipasi warga, disebabkan salah satu pusat pembangunan yang dicoba warga secara langsung atas kebijakan dari aktivitas pembangunan. Masyarakat turut dan dalam keterlibatan kebijakan perumusan maupun selaku kebijakan aplikasi tersebut, warga dikira lebih tau menau terpaut dengan keadaan lingkungannya (Bisman *et al.*, 2019). Partisipasi warga dapat dimengerti selaku proses partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, formulasi, pembangunan serta pengembangan warga (Purba dan Djamin, 2015). Publik hendak membuat komitmen kepada pihak pemerintah dalam keterlibatannya selaku pihak yang melakukan sesuatu program serta keterlibatan pengambilan keputusan kala dibutuhkan sehingga karyawan senantiasa berkontribusi kepada warga hendak tingkatkan daya guna kinerja yang baik dalam warga ataupun sesama karyawan. Hal ini sejalan dengan prinsip *Good Governance* yang dikembangkan oleh OECD nomor 1 tentang pasrisipasi.

Prinsip partisipasi yang dibesarkan oleh OECD ialah menjadikan bawah pembangunan yang suatu kebutuhan tiap hari semacam halnya kebutuhan. Mengenai ini diberikan kesempatan buat berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan, perlunya pembangunan karena suatu pergantian proses kedalam perihal yang positif guna tingkatkan kualitas program dan sebagai motivasi pegawai dalam melaksanakan program yang pada akhirnya menjadikan kinerja meningkat secara efektif dan efisien.

Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian terdahulu Islamiah (2018) tentang partisipasi masyarakat yang menunjukkan skor partisipasi masyarakat pada di Desa Sanglepongan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang tergolong sedang yang dibuktikan oleh skor gabungan dalam bidang-bidang partisipasi. Hal ini membuktikan bahwa Desa anglepongan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang tergolong sedang. Hasil penelitian juga didukung oleh Taryono dan Ahmad (2021) yang menyatakan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas kinerja pembangunan di Desa Majasari hasil analisis korelasi yang berada pada tingkat sedang dan memiliki kontribusi yang tidak terlalu tinggi.

Hasil partisipasi oleh Farid dan Sudarmanto (2019) melaporkan partisipasi anggota mempengaruhi terhadap daya guna dimana pada dasarnya partisipasi yang terus menjadi

berkontribusi aktif hingga bertambah pula pada daya guna yang baik sehingga hendak menggapai keberhasilan yang cocok harapan pada industri. Partisipasi juga dikemukakan oleh Endah (2016) yang hasilnya menyebutkan partisipasi berpengaruh efektivitas dikarenakan pada pembangunan dikabupaten pangandaran diperlukan keikutsertaan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut.

Pengaruh Transparasi Terhadap Efektivitas Kinerja

Dari penelitian mendukung hipotesis yang menyatakan “Partisipasi berpengaruh terhadap efektifitas kinerja pegawai”. Dapat dilihat t_{hitung} sebesar sebesar 3,948 beserta signifikansi 0,000 Nilai t_{tabel} sebesar 2,037 yang berarti $t_{hitung} 3,948 > t_{tabel} 2,037$ dan signifikansi $0,000 < 0,05$, Maka dapat diputuskan bahwa H_2 diterima yang berarti X_2 (transparasi) berpengaruh terhadap Y (Efektivitas kinerja pegawai).

Kebebasan dalam mengakses aktivitas yang berkaitan dengan pemerintahan serta keputusan yang terbuat pimpinan, transparasi pula mempunyai keputusan yang mengaitkan pemangku kepentingan buat menguasai struktur serta guna pemerintahan yang ialah tujuan dari kebijakan. keterbukaan serta pemudahan mendapatkan data ialah kunci pemerintah buat memperoleh keyakinan warga. (Nahrudin,2014). Transparasi mengacu pada keterbukaan informasi tentang aspek pelayanan kepa masyarakat yang hasilnya akan memuaskan masyarakat. Hal ini transparasi berpengaruh terhadap efektivitas kinerja yang sejalan dengan prinsip *Good Governance* yang dikembangkan oleh OECD nomor 3 tentang transparasi.

Pengembangan prinsip yang di OECD ini transparasi yang menjamin kebebasan warga dalam memperoleh data atas pertanggungjawaban pemerintah dengan terdapatnya keterbukaan hendak menolong warga dalam mengenali data serta pula perencanaan aktivitas yang dicoba oleh pemerintah bila mempunyai keterbukaan data hendak tingkatkan efektivitas kinerja pegawai.

Hasil transparasi diperkuat oleh penelitian terdahulu Khoiriyah dan Rahayu (2021) yang menyatakan transparasi berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pegawai instansi pemerintah yang semakin baik dengan dibuktikan keterbukaan pemerintah daerah terkait informasi dan aktivitas pengelolaan keuangan daerah kepada para pemangku kepentingan untuk menjadikan pemerintahan yang bersih, jujur dan bebas dari bentuk penyimpangan. Penelitian ini juga sejalan dengan Budiasni *et al.*, (2017) menunjukkan hasil transparasi berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pegawai yang memberikan tekanan pemerintah terkait keterbukaan untuk memperoleh informasi yang seluas-luasnya dan memberikan masukan, sehingga menjadikan penampilan kinerja meningkat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Hasil transparasi yang dilakukan oleh Jitmau *et al.*, (2017) melaporkan kalau transparasi mempengaruhi terhadap kinerja pemerintah wilayah dengan ditunjukkan dalam membagikan data lewat media yang pas waktu, mencukupi, akurat, jelas serta gampang diakses oleh pihak yang berkepentingan. Hasil ini juga sejalan dengan Lestiawan dan Jatmiko (2015) keterbukaan informasi sangat penting bagi pemerintah dengan mendorong kinerja dalam penerapan program-program yang nantinya akan menjadi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai

Hasil penelitian ini akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pegawai yang bisa dilihat pada nilai t_{hitung} sebesar 2,099 beserta signifikansi 0,043 Nilai t_{tabel} sebesar 2,037 yang berarti $t_{hitung} 2,099 > t_{tabel} 2,037$ dan signifikansi $0,043 > 0,05$, Maka dapat diputuskan bahwa H_3 diterima yang berarti X_3 (akuntabilitas) berpengaruh terhadap Y (Efektivitas kinerja pegawai).

Penerapan akuntabilitas menjadikan tolak ukur kinerja pemerintahan dalam hal pengelolaan keuangan (Edowati *et al.*, 2021). Dampak dari penerapan akuntabilitas terhadap efektivitas kinerja pegawai yang berkualitas mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat diakui keterbukaan yang dapat menilai efektivitasnya (Napitupulu *et al.*,2016) sehingga akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pegawai, hal ini sejalan dengan prinsip *Good Governance* dikembangkan oleh OECD nomor 8 tentang akuntabilitas.

Pengembangan yang diterapkan oleh OECD menyatakan akuntabilitas berarti tanggungjawab dalam pelaksanaan pemerintah yang memacu pada hasil dan gagalnya rencana kegiatan yang telah sesuai dengan visi misi diterapkan oleh pemerintah sehingga penilaian bisa

dilihat pada target dan sasaran yang tepat. Akuntabilitas adalah syarat dalam pencegahan penyimpangan kekuasaan yang ditujukan secara langsung untuk pencapaian tujuan dengan tingkat efisiensi, kejujuran, dan kebijakan yang baik.

Hasil dari Wahyuni Arifin dan Saiful Muchlis (2021) yang hasilnya akuntabilitas pegawai semakin meningkat dan keterbukaan penyelenggaraan urusan publik yang akan memudahkan dalam pengawasan agar terhindar dari penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang, penelitian dari Lestiawan dan Jatmiko (2015) sejalan dengan hasil penelitian ini yaitu suatu prinsip akuntabel yang artinya bertanggungjawab terhadap hasil dari program yang dijalankan serta kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan.

Dari penelitian-penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan prinsip akuntabilitas akan semakin tinggi maka semakin meningkat pada efektivitas kinerja dan akuntabilitas bisa diterapkan dengan baik sesuai dengan indikator yang sesuai pada tujuan yang ditetapkan serta menambah kepercayaan masyarakat terhadap tanggungjawab sebagai pemerintah. Dengan demikian prinsip akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pegawai.

Pengaruh Daya Tangkap (Responsivitas) Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai

Hasil dari uji t (statistik) penelitian ini variabel Daya tangkap (Responsivitas) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Nilai signifikansi variabel daya tangkap adalah 0,0005 lebih kecil dari nilai α 0,05 dan nilai t_{hitung} (2,969) > t_{tabel} (2.037) maka H4 diterima.

Pengembangan dari OESD terkait dengan prinsip *Good Governance* yang nomor 4 tentang daya tangkap yang menggambarkan pelayanan yang baik sesuai dengan visi misi dalam mencapai tujuan untuk membantu masyarakat dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat dengan cepat, tepat dan akurat sehingga masyarakat menilai bahwa kinerja pegawai cukup efektif. Hal ini menandakan daya tangkap (Responsivitas) berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pegawai. Penelitian ini di latarbelakangi oleh Atmaja (2020) yang menyatakan bahwa daya tangkap (Responsivitas) berpengaruh positif. Hal ini menandakan pelayanan pegawai yang cepat dan meningkatkan kinerja pegawai dan menjadikan pelayanan ini masyarakat memiliki kepuasan. Hubungan antara daya tangkap dengan efektivitas kinerja pegawai semakin baik pendapat masyarakat terhadap daya tangkap pemerintahan, dan apabila ketanggapan yang buruk, maka efektivitas kinerja akan menurun. Hasil penelitian ini juga dilakukan oleh Ahmad Nurhidayat (2021) yang hasilnya daya tangkap (responsivitas) berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai dibuktikan adanya pelayanan yang cepat, fasilitas yang disediakan memadai dan akan meningkatkan efektivitas serta efisiensi kinerja pegawai. Pelayanan daya tangkap baik akan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang baik sehingga tidak ada kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan pegawai. Penelitian Lestiawan dan Jatmiko (2015) hasil yang diperoleh adalah kualitas pelayanan yang menjadi penilaian masyarakat dalam kinerja, semakin baik pelayanan masyarakat maka masyarakat akan menilai kinerja akan bertambah baik pula. Pegawai sudah seharusnya menampung aspirasi atau keluhan dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti untuk memberikan solusi bukan hal merugikan masyarakat. Beberapa hasil dari penelitian terdahulu dapat disimpulkan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Ponorogo variabel Daya tangkap (*Responsiveness*) berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pegawai, dibuktikan kecakapan dalam pelayanan yang baik akan meningkatkan efektivitas kinerja yang meningkat.

KESIMPULAN

Peneliti ini ditunjukkan buat meyakinkan secara empiris tentang pengaruh pelaksanaan *Good Governance* terhadap efektivitas kinerja pegawai. Hipotesis di dalam penelitian mengenakan uji regresi berganda dengan aplikasi SPSS tipe 26 dimana peneliti memakai 37 informasi dari 50 informasi yang memenuhi kriteria sampel. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

Pengujian menggunakan uji parsial diperoleh hasil partisipasi berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Ponorogo dengan keterikatan teori Farid dan Sudarmanto (2019) yang menyatakan partisipasi anggota

berpengaruh terhadap efektivitas dimana pada dasarnya partisipasi yang semakin berkontribusi aktif maka meningkat pula pada efektivitas yang baik sehingga akan mencapai keberhasilan yang sesuai harapan pada perusahaan.

Pengujian menggunakan uji parsial diperoleh hasil transparansi berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Ponorogo, penelitian ini berkaitan dengan teori Jitmau et al., (2017) menerangkan transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dengan ditunjukkan keterbukaan informasi melalui sasaran yang cepat, akurat, jelas dan bisa dilihat oleh pihak yang berkepentingan. Hasil lain juga dilakukan oleh yang hasilnya adalah transparansi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah yang dibutuhkan suatu instansi dalam memberikan informasi-informasi yang akan membuat kepercayaan pihak luas percaya kepada pemerintah dalam meningkatkan kinerja yang baik

Pengujian menggunakan uji parsial memperoleh bahwasanya akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Ponorogo, penelitian ini keterkaitan teori Lestiawan dan Jatmiko (2015) sejalan dengan hasil penelitian ini yaitu suatu prinsip akuntabel yang artinya bertanggungjawab terhadap hasil dari program yang dijalankan serta kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan.

Pengujian menggunakan uji parsial diperoleh hasil daya tangkap berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Ponorogo yang hasilnya berkaitan dengan teori Lestiawan dan Jatmiko (2015) hasil yang diperoleh adalah kualitas pelayanan yang menjadi penilaian masyarakat dalam kinerja, semakin baik pelayanan masyarakat maka masyarakat akan menilai kinerja akan bertambah baik pula. Pegawai sudah seharusnya menampung aspirasi atau keluhan dari masyarakat yang kemudian ditidakanjuti untuk memberikan solusi bukan hal merugikan masyarakat.

Kesimpulan Penerapan prinsip *Good Governance* pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Ponorogo telah menerapkan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas dengan baik dan lebih bisa ditingkatkan supaya efektivitas kinerja pegawai juga semakin baik, sehingga keterkaitan teori dari Lembaga Administrasi Negara jika *Good Governance* baik maka meningkat pula efektivitas kinerja pegawai dan kebijakan pembuatan strategi dalam pengelolaan pemerintahan akan semakin maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisman, M. Hamdi, A. Jaenuri dan Kusworo. 2019. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Kinerja Pengelola Terhadap Kualitas Pelayanan Penyediaan Sarana Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Rokan Hulu. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*. Vol. 2, No. 3, h. 1-18.
- Edowati, M., H. Abubakar dan M. Said. 2021. Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai. *Indonesian Journal of Business and Management*. Vol. 4, No. 1, h. 87-96.
- Endah, K. 2016. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol. 2, No. 1, h. 596-605.
- Farid, A. dan B. Sudarmanto. 2019. *The Role of The Farmers Partisipation Toward Sembodomakmur Agribusiness*. Vol. 15, No. 3, h. 229-238.
- Indra, G. 2019. Pengaruh Daya Tanggap Dan Kinerja Pegawai Terhadap Kepuasan Masyarakat Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur Indra Gunawan Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Metro. *Jurnal Simplex*. Vol. 2, No. April, h. 33-40.
- Irianto. 2016. *Kebijakan dan Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik (KMSDM-SP)*. Yogyakarta.:
- Jitmau, F., L. Kalangi dan L. Lambey. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sorong). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill."* Vol. 8, No. 1, h. 276-285.
- Kholidah, N. dan T. Mildawati. 2017. Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Pegawai. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 6, h. 1217-1236.
- Lestiawan, H. Y. dan B. Jatmiko. 2015. *Key Success Factor Good Government Governance Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah* (Survey pada Pemerintah Kabupaten

- Gunungkidul). *Maksimum*. Vol. 5, No. 1, h. 32.
- Meme, M. E. 2019. Pengaruh pengawasan fungsional, transparansi, akuntabilitas dan pelayanan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 8, No. 10, h. 1-19.
- Nahrudin, Z. 2014. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 4, No. 2, h. 193-201.
- Purba, Irma Sunarty Djamin, D. 2015. Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Good Governance di Tingkat Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*. Vol. 3, No. 1, h. 25-36.
- Silaningsih, E., D. Gemina, R. Habibi dan P. Gemini. 2022. Kinerja Koperasi Berbasis Kreativitas dan Inovasi Serta Partisipasi Anggota. *INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*. Vol. 5, No. 3, h. 301-313.
- Tjiptono, F. dan Gregorius Chandra. 2011. *Service, Quality & Satisfaction*. Edisi 3. Yogyakarta: Andi.
- Wahyuni Arifin, Saiful Muchlis, S. 2021. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan Pemanfaatan *Accounting Information System* sebagai Pemoderasi. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*. Vol. 6, No. 3, h. 88-96.
- Warjiyati, S. 2018. Implementasi {Prinsip}-{Prinsip} {Good} {Governance} {Dalam} {Pelaksanaan} {Pemerintahan} {Indonesia}. *Prosiding Konferensi Nasional Ke-8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA)*. No. 64, h. 1-10.
2018. Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Lex Crimen*. Vol. 6, No. 10, h. 1-11.